

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Rapat dibuka oleh Bapak Roberto Sianturi, S.H. sebagai Ketua Tim Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyampaikan bahwa tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi SPAK secara rutin adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Kemudian acara rapat dilanjutkan oleh Bapak Alius Lase, S.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyampaikan, berdasarkan laporan hasil survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang pelaksanaan surveynya dilakukan dalam periode triwulan IV yaitu pada bulan Oktober-Desember 2025, didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Kategori
1	Manipulasi Peraturan/Prosedur	4,000	Sangat Baik
2	Penyalagunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	4,000	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik
6	Hadiah	4,000	Sangat Baik
7	Transparansi Pembayaran	4,000	Sangat Baik
8	Percaloan	4,000	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik

Dari 3 (tiga) nilai SPAK terendah tersebut diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu:

1. Indikator Terendah I: Manipulasi Peraturan/Prosedur

- Penyebab/Kendala: Masih ada pengguna layanan yang masih belum mengetahui tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
- Solusi: Memberikan informasi baik secara langsung maupun melalui Customer Service serta dapat juga melalui website Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sehingga Masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap sulit
- Rencana Tindak Lanjut: Memberikan informasi secara langsung maupun melalui Customer Service serta dapat juga melalui website Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 26 Januari 2026

## 2. Indikator Terendah II: Penyalahgunaan Jabatan

- Penyebab/Kendala: Masih adanya Masyarakat yang percaya bahwa dengan mengenal salah satu pegawai di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli maka akan lebih cepat dan mudah dalam memperoleh layanan
- Solusi: Mengarahkan pegawai untuk focus pada tujuan kelompok dan organisasi bukan kepentingan pribadi
- Rencana Tindak Lanjut: Mengarahkan pegawai untuk focus pada tujuan kelompok dan organisasi bukan kepentingan pribadi dan meningkatkan integritas kerja
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 26 Januari 2026

## 3. Indikator Terendah III: Menjual Pengaruh

- Penyebab/Kendala: Masih ada pengguna layanan yang menggunakan kuasa atau jasa orang ketiga untuk mengurus keperluannya dipersidangan atau ada pihak luar yang mengaku kerja di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
- Solusi Memberikan informasi papan identitas seluruh Hakim dan ASN Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di ruang PTSP agar tidak ada pihak yang menyalagunakan identitas
- Rencana Tindak Lanjut: Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di ruang tamu terbuka
- Pelaksanaan; Dilaksanakan tanggal 26 Januari 2026

Kemudian Bapak Roberto Sianturi, S.H. sebagai Ketua Tim Survei menyampaikan perlunya kerjasama seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Persepsi Anti Korupsi pada periode Triwulan IV akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan dihimbau kepada para petugas survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisisioner yang diberikan. Kemudian acara monitoring dan evaluasi ditutup.

Gunungsitoli, 26 Januari 2026

Ketua Tim SKM dan SPAK



Roberto Sianturi, S.H.  
NIP. 19940606 201712 1 002

## LAMPIRAN

### EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH I MANIPULASI PERATURAN/PROSEDUR

Tercantumnya Nomor Customer Service pada website Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang dapat dihubungi oleh masyarakat apabila masih belum mengetahui terkait Peraturan ataupun Prosedur



The image shows a screenshot of the official website for the Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. The website header includes the logo of the Mahkamah Agung Republik Indonesia and the name of the court. A navigation menu is visible with links for Beranda, Tentang Pengadilan, Layanan Publik, Layanan Hukum, Berita, Hubungi Kami, and Informasi Birokrasi. The main content area features a section titled "CUSTOMER SERVICE ONLINE PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI". Below the title, there is a short paragraph in Indonesian stating that the court has opened an online customer service for the Nias Islands community and provides a QR code for scanning. A red button labeled "Lebih Detail" is positioned below the text. To the right of the main text is a large graphic containing a QR code and the WhatsApp contact number: 0822 4706 7035. The graphic also includes the court's motto: "Santun, Objektif, Kredibel, Harmonis, Inovatif".

## EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH II PENYALAHGUNAAN JABATAN

Mengarahkan pegawai PTSP untuk focus pada tujuan kelompok dan organisasi bukan kepentingan pribadi dan meningkatkan integritas kerja



**LAMPIRAN**  
**EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH III**  
**MENJUAL PENGARUH**

Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di ruang Tamu terbuka



**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE TRIWULAN IV  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

**A. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi
7. asional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM).
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

**C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

Adapun hasil tindak lanjut 3 Unsur terendah monitoring dan evaluasi survey persepsi anti korupsi (SPAK) antara lain:

1. Indikator Terendah I : Manipulasi Peraturan/Prosedur  
Tercantumnya Nomor Costumer Service pada website Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang dapat dihubungi oleh maysarakat apabila masih belum mengetahui terkait Peraturan ataupun Prosedur

2. Indikator Terendah II: Penyalahgunaan Jabatan

Mengarahkan pegawai PTSP untuk focus pada tujuan kelompok dan organisasi bukan kepentingan pribadi dan meningkatkan integritas kerja

3. Indikator Terendah III: Menjual Pengaruh

Tindak lanjut dari unsur ini adalah Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di ruang PTSP agar tidak ada penyalahgunaan identitas

**D. Penutup**

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei persepsi anti korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Gunungsitoli, 27 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli



Zulfadly, S.H., M.H.

NIP. 19760906 200112 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)  
Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id) , Website : [www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)

Nomor : W2.U12/ /HK/2026

Gunungsitoli, 23 Januari 2026

Perihal : *Undangan rapat*

Kepada Yth.

Panmud Hukum dan Staff Kepaniteraan Muda Hukum

Di

Tempat

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B yang akan dilaksanakan pada :

Pada hari, tanggal : Senin, 26 Januari 2026

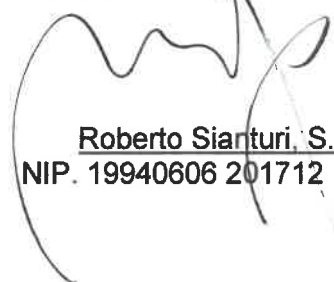
Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Acara : Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SKM dan SPAK



Roberto Sianturi, S.H  
NIP. 19940606 201712 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)  
Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id) , Website : [www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)

**Daftar Hadir**

**Monitoring Dan Evaluasi SKM dan SPAK**  
**Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B**  
**Hari Senin Tanggal 26 Januari 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	Roberto Sianturi, S.H	Ketua Tim	1.	2.	
2.	Alius Lase, S.H.	Sekretaris Tim			
3.	Deyendi Molore Manalu, S.Sos	Anggota	3.		
4.	Hagaina Monika Br Tarigan, S.H.	Anggota		4.	
5.	Wirmi Sandroto, S.E	Anggota	5.		

Ketua Tim SKM dan SPAK

**Roberto Sianturi, S.H**  
NIP. 19940606 201712 1 002

**DOKUMENTASI**

